

**ANALISIS HISTORIS-KOMPARATIF SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI
ERA KOLONIAL DAN REPUBLIK INDONESIA SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP KESETARAAN AKSES PENDIDIKAN**

Catur Prida Retnivia^{1*}, Pratisa Martha Sari², Krista Alisa Meyliani³, Wahyu Setiya
Ningrum⁴, Widyatmike Gede Mulawarman⁵, Mukhamad Nurhadi⁶
¹⁻⁶ Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman
¹pridaretnivia@gmail.com, ²sari.sudiro02@gmail.com,
³kristaalisameyliani@gmail.com, ⁴wahyuningrum53@guru.sd.belajar.id,
⁵widyatmike@fkip.unmul.ac.id, ⁶nurhadi@fkip.unmul.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparative education financing systems between the colonial era and the era of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), as well as their implications for equity in educational access. The study employs a qualitative approach with a historical-comparative design through library research and document analysis of historical archives, education policies, and national and international education statistics. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and thematic conclusion drawing. The findings indicate that the education financing system during the colonial era was limited, exclusive, and discriminatory, resulting in low educational participation rates among indigenous populations, which remained below 10%. In contrast, during the NKRI era, the education financing system has undergone a significant transformation toward a more inclusive approach, marked by the policy of allocating at least 20% of the national budget (APBN) to education and the implementation of financing programs such as the School Operational Assistance (BOS) and the Indonesia Smart Program (PIP). These initiatives have contributed to a substantial increase in educational access, reaching over 80%. Disparities in educational access persist, particularly between urban and rural areas as well as between developed and underdeveloped regions. These findings suggest that increased education financing has not been fully accompanied by equitable distribution based on needs. The study highlights that while education financing plays a crucial role in expanding access, its effectiveness depends on the adoption of distributive justice principles in resource allocation.

Keywords: Education Financing, Equity In Education Access, Colonial Education, Education Policy, Educational Equity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembiayaan pendidikan komparatif antara era kolonial dan era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta implikasinya terhadap kesetaraan akses pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif melalui riset pustaka dan analisis dokumen arsip sejarah, kebijakan pendidikan, dan statistik pendidikan nasional dan internasional. Analisis data dilakukan melalui reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan tematik. Temuan menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pendidikan pada era kolonial terbatas, eksklusif, dan diskriminatif, sehingga mengakibatkan rendahnya angka partisipasi pendidikan di kalangan penduduk asli, yang tetap di bawah 10%. Sebaliknya, pada era NKRI, sistem pembiayaan pendidikan telah mengalami transformasi signifikan menuju pendekatan yang lebih inklusif, ditandai dengan kebijakan alokasi setidaknya 20% dari anggaran negara (APBN) untuk pendidikan dan implementasi program pembiayaan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Cerdas (PIP). Inisiatif-inisiatif ini telah berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan yang substansial, mencapai lebih dari 80%. Kesenjangan dalam akses pendidikan masih berlanjut, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara daerah maju dan daerah terbelakang. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya diiringi oleh distribusi yang adil berdasarkan kebutuhan. Studi ini menyoroti bahwa meskipun pembiayaan pendidikan memainkan peran penting dalam memperluas akses, efektivitasnya bergantung pada penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif dalam alokasi sumber daya.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, Kesetaraan Akses Pendidikan, Pendidikan Kolonial, Kebijakan Pendidikan, Kesetaraan Pendidikan

A. Pendahuluan

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen strategis dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan (Harahap, 2024; Mangkuwinata et al., 2025). Alokasi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya finansial memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingkat aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia (Nover et al.,

2025; Simanjuntak et al., 2026a, 2026b). Oleh karena itu, sistem pembiayaan pendidikan harus dirancang secara efektif, efisien, dan berkeadilan guna menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan (Simanjuntak et al., 2026).

Dalam perspektif historis, sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia mengalami transformasi yang mendasar dari era kolonial menuju era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Fauzi et al., 2024). Pada masa kolonial, pendidikan tidak ditempatkan sebagai hak universal,

melainkan sebagai instrumen untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi pemerintah kolonial (Madyan et al., 2025). Kebijakan pembiayaan pendidikan pada periode ini bersifat terbatas dan selektif, dengan alokasi sumber daya yang lebih banyak diarahkan kepada kelompok tertentu, khususnya golongan Eropa dan elite pribumi (Lesmana, 2025). Pola pembiayaan tersebut mencerminkan paradigma pendidikan yang eksklusif dan berorientasi pada kepentingan kekuasaan, sehingga akses pendidikan bagi masyarakat luas, terutama pribumi, menjadi sangat terbatas (Prihatin et al., 2025).

Sistem pendidikan pada era kolonial ditandai oleh dualisme struktural yang menciptakan segregasi sosial dalam akses pendidikan (Kambu, 2025). Lembaga pendidikan dibedakan berdasarkan status sosial dan ras, yang secara langsung memengaruhi distribusi pembiayaan pendidikan. Pembiayaan tidak diarahkan untuk pemerataan, melainkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan administratif kolonial. Kondisi ini berkontribusi terhadap terjadinya ketimpangan akses

pendidikan yang sistemik dan berkelanjutan, baik dari segi sosial maupun geografis. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan pada era kolonial berkontribusi terhadap reproduksi ketidakadilan dalam sistem pendidikan.

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan reformasi sistem pendidikan secara komprehensif dengan menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara (Rahayu, 2025) (Sari et al., 2026). Transformasi ini diikuti oleh perubahan kebijakan pembiayaan pendidikan yang menekankan prinsip pemerataan dan inklusivitas (Simanjuntak et al., 2026b). Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, berbagai program pembiayaan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta berbagai skema beasiswa, dikembangkan untuk mengurangi hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan (Ifyati et

al., n.d.; Prihatin & Sutangsa, 2025; Rohayati et al., 2025).

Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam pembiayaan pendidikan, persoalan keadilan akses pendidikan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Ketimpangan akses pendidikan masih terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dan daerah tertinggal. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta perbedaan kapasitas fiskal daerah menjadi determinan utama dalam menciptakan kesenjangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran belum secara otomatis menjamin tercapainya keadilan akses pendidikan, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas sistem pembiayaan pendidikan dalam mendistribusikan akses secara merata.

Keadilan akses pendidikan berkaitan erat dengan konsep keadilan distributif yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya berdasarkan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks

pembiayaan pendidikan, prinsip ini mengharuskan adanya alokasi anggaran yang tidak hanya merata secara nominal, tetapi juga mempertimbangkan ketimpangan struktural yang ada. Dengan demikian, sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan harus mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dan mengurangi kesenjangan akses yang terjadi.

Peningkatan pembiayaan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, ekspansi kebijakan, dan perubahan demografi.

Sejumlah penelitian yang dilaksanakan oleh (Harahap, 2024; Mustabsyirah & Yuspiani, 2025; Runiasih & Ahmad, 2025) telah mengkaji pembiayaan pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks efisiensi anggaran, desentralisasi fiskal, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada kondisi kontemporer dan belum mengintegrasikan perspektif historis dalam analisisnya. Selain itu, kajian yang secara eksplisit membandingkan sistem pembiayaan pendidikan antara era kolonial dan era

NKRI masih relatif terbatas, khususnya yang mengaitkannya dengan isu keadilan akses pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) dalam literatur yang mengkaji keterkaitan antara dinamika historis pembiayaan pendidikan dan distribusi akses pendidikan secara komprehensif.

Penelitian yang ada cenderung menganalisis pembiayaan pendidikan secara terpisah dari dimensi keadilan sosial, sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana kebijakan pembiayaan berkontribusi terhadap ketimpangan atau pemerataan akses pendidikan. Padahal, pemahaman yang integratif antara aspek pembiayaan dan keadilan akses sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Meskipun pembiayaan pendidikan merupakan instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan, penelitian ini tidak mengasumsikan adanya hubungan sebab-akibat yang bersifat langsung antara peningkatan anggaran dan peningkatan akses

pendidikan. Akses pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, termasuk pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, kapasitas tata kelola, dan implementasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan pembiayaan pendidikan sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perubahan akses pendidikan dalam konteks historis yang lebih luas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi integratif historis dan keadilan akses dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan historis-komparatif untuk menganalisis sistem pembiayaan pendidikan antara era kolonial dan era NKRI, sehingga memberikan perspektif longitudinal terhadap perkembangan kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis pembiayaan pendidikan dengan konsep keadilan akses pendidikan dalam kerangka keadilan distributif, sehingga mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan pembiayaan dan distribusi akses

pendidikan secara lebih komprehensif. Ketiga, penelitian ini menghubungkan dinamika historis dan kondisi kontemporer dalam satu kerangka analisis, sehingga dapat mengidentifikasi pola perubahan maupun keberlanjutan dalam sistem pembiayaan pendidikan.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris dalam memahami perkembangan sistem pembiayaan pendidikan, tetapi juga kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen pendidikan, khususnya terkait dengan hubungan antara pembiayaan pendidikan dan keadilan akses. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis karakteristik sistem pembiayaan pendidikan pada era kolonial dan era NKRI; (2) membandingkan kedua sistem tersebut dalam perspektif historis; dan (3) mengkaji implikasi sistem pembiayaan pendidikan terhadap keadilan akses pendidikan. Penelitian

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia melalui kebijakan pembiayaan yang lebih berkeadilan.

Efektivitas pembiayaan sangat bergantung pada distribusi dan tata kelola kebijakan.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Desain

Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika sistem pembiayaan pendidikan pada dua periode yang berbeda, yaitu era kolonial dan era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta implikasinya terhadap keadilan akses pendidikan.

Desain historis-komparatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji perubahan, keberlanjutan, dan perbedaan karakteristik kebijakan pembiayaan pendidikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada deskripsi fenomena,

tetapi juga pada interpretasi makna kebijakan secara kontekstual dan longitudinal.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini meliputi:

- a. Sistem pembiayaan pendidikan pada era kolonial (± 1900 –1942)
- b. Sistem pembiayaan pendidikan pada era NKRI (1945–sekarang)
- c. Implikasi sistem pembiayaan terhadap keadilan akses pendidikan

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berbasis dokumen sekunder yang bersifat autentik dan terverifikasi. Data diperoleh dari arsip historis, dokumen kebijakan, data statistik

nasional, serta literatur ilmiah yang relevan.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk dibandingkan secara numerik langsung, melainkan sebagai representasi deskriptif dari dinamika akses pendidikan pada masing-masing era.

Untuk memperkuat validitas empiris, penelitian ini juga memanfaatkan data faktual terkait akses pendidikan dan pembiayaan pendidikan pada masing-masing era. Ringkasan jenis dan sumber data disajikan pada Table 1.

Table 1. Types and Sources of Research Data

No	Era	Data Type	Indicator	Empirical Data	Source
1	Colonial	Educational Access	Indigenous education participation	< 5% (± 1900)	Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
2	Colonial	Educational Access	Formal education participation	± 6 –7% (1930)	Nationaal Archief
3	Colonial	Educational Structure	Types of schools	ELS, HIS, Village Schools	Historical literature

No	Era	Data Type	Indicator	Empirical Data	Source
4	Colonial	Financing	Budget orientation	Oriented toward colonial interests	Colonial policy documents
5	Colonial	Equity of Access	Educational discrimination	High (race-based)	Historical studies
6	NKRI	Financing	Education budget allocation	≥20% of national budget (APBN)	Ministry of Finance of Indonesia
7	NKRI	Educational Access	Gross Enrollment Rate (Primary)	>100%	Statistics Indonesia (2023)
8	NKRI	Educational Access	Gross Enrollment Rate (Senior High School)	±80–90%	Statistics Indonesia (2023)
9	NKRI	Financing Program	School Operational Assistance (BOS)	>45 million students	Ministry of Education, Culture, Research, and Technology
10	NKRI	Equity of Access	Regional disparities	Still exist	World Bank
11	NKRI	Quality of Access	Educational inequality	High in disadvantaged (3T) regions	UNESCO

Berdasarkan table 1 terlihat bahwa data penelitian ini mencakup dua periode utama, yaitu era kolonial dan era NKRI, dengan fokus pada aspek akses pendidikan, struktur

sistem pendidikan, pembiayaan, serta keadilan akses. Pada era kolonial, data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan masyarakat pribumi masih sangat rendah, yaitu

kurang dari 5% pada sekitar tahun 1900 dan hanya meningkat menjadi sekitar 6–7% pada tahun 1930. Selain itu, struktur pendidikan yang terdiri dari *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), dan sekolah desa menunjukkan adanya diferensiasi akses pendidikan berdasarkan status sosial dan ras.

Dari aspek pembiayaan, sistem pendidikan pada era kolonial berorientasi pada kepentingan pemerintah kolonial, sehingga distribusi anggaran tidak ditujukan untuk pemerataan. Hal ini diperkuat oleh indikator keadilan akses yang menunjukkan tingkat diskriminasi pendidikan yang tinggi. Data tersebut secara konsisten diperoleh dari berbagai sumber historis seperti arsip Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde dan Nationaal Archief, serta kajian literatur yang relevan, yang menunjukkan adanya pola sistem pendidikan yang eksklusif dan tidak merata.

Sebaliknya, pada era NKRI, data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam sistem pembiayaan dan akses pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan yang mencapai minimal 20% dari APBN menunjukkan

komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan. Hal ini berdampak pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), pada jenjang sekolah dasar telah mencapai lebih dari 100%, dan pada jenjang sekolah menengah atas berada pada kisaran 80–90%. Selain itu, program pembiayaan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menjangkau lebih dari 45 juta siswa, yang menunjukkan adanya perluasan akses pendidikan secara nasional.

Data pada table 1 juga menunjukkan bahwa keadilan akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Disparitas wilayah masih terjadi, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan World Bank dan UNESCO yang mengidentifikasi adanya ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal (3T). Dengan demikian, Table ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kuantitatif dalam pembiayaan dan akses pendidikan, tetapi juga mengungkap tantangan dalam mewujudkan distribusi pendidikan yang berkeadilan.

Indikator yang digunakan pada masing-masing periode tidak sepenuhnya identik karena mengikuti

karakteristik sumber data historis yang tersedia. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak melakukan perbandingan statistik secara langsung, melainkan menggunakan indikator-indikator tersebut sebagai bukti kontekstual untuk mengidentifikasi perubahan orientasi sistem pembiayaan pendidikan dari waktu ke waktu.

4. Study Pustaka

Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan buku akademik, artikel jurnal, serta laporan dari lembaga nasional dan internasional. Beberapa sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data statistik pendidikan Indonesia dari [Statistik Pendidikan Indonesia \(BPS\)](#) (memuat indikator pendidikan nasional berbasis Susenas)
2. Data indikator partisipasi pendidikan (APS, APK, APM) dari [TableAngka Partisipasi Pendidikan \(BPS\)](#)
3. Data longitudinal indikator pendidikan Indonesia

[Indikator Pendidikan 1994–2024 \(BPS\)](#)

4. Data ringkasan pendidikan nasional dari Kemendikbud [Indonesia Education Statistics in Brief 2023/2024](#)
5. Portal data pendidikan nasional (DAPODIK & Rapor Pendidikan) [Portal Data Pendidikan Indonesia](#)
6. Data global pendidikan dari World Bank [World Bank Education Data Indonesia](#)
7. Laporan pendidikan Indonesia oleh World Bank [The Promise of Education in Indonesia \(World Bank\)](#)

Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan terhadap arsip kebijakan, laporan pendidikan, dan data statistik untuk mengidentifikasi pola pembiayaan dan akses pendidikan.

Sumber dokumen yang digunakan meliputi:

1. Data partisipasi sekolah berdasarkan usia dan wilayah [Angka Partisipasi Sekolah \(APS\) Indonesia](#)
2. Data Angka Partisipasi Murni (APM)

[APM Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan](#)

3. Data APK dan indikator akses pendidikan nasional
[Dashboard APK & APM Kemendikbud](#)
4. Data UNESCO (melalui World Bank API – global comparison)
[UNESCO Education Statistics \(via World Bank\)](#)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah dan laporan resmi, seperti publikasi statistik pendidikan dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pendidikan nasional dari Kementerian Pendidikan, serta laporan internasional dari World Bank dan UNESCO. Data statistik pendidikan yang digunakan meliputi indikator partisipasi pendidikan, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM), yang diperoleh dari publikasi resmi BPS dan portal data pendidikan nasional.

Analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai kebijakan

pendidikan, laporan historis, serta data longitudinal pendidikan untuk mengidentifikasi pola pembiayaan dan distribusi akses pendidikan. Data dari lembaga internasional seperti UNESCO dan World Bank digunakan sebagai pembanding untuk memberikan perspektif global serta meningkatkan validitas analisis. Kombinasi berbagai sumber data tersebut memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pembiayaan pendidikan dan implikasinya terhadap keadilan akses pendidikan.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi:

a. Reduksi Data

Data diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan kategori:

- a. Era kolonial
- b. Era NKRI
- c. Keadilan akses pendidikan

b. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk narasi dan Tableperbandingan untuk memudahkan interpretasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengidentifikasi pola

perubahan, perbedaan, serta implikasi kebijakan terhadap akses pendidikan.

Selain itu, digunakan:

1. Content analysis untuk menganalisis isi kebijakan
2. Comparative analysis untuk membandingkan kedua era

6. Analisis Komparatif

Analisis komparatif dilakukan secara sistematis terhadap aspek:

1. Orientasi kebijakan
2. Distribusi anggaran
3. Akses pendidikan
4. Dampak terhadap keadilan akses

Hasil analisis komparatif disajikan dalam Table 2.

Table 2. Analytical Comparison of Education Financing Systems

Aspect	Colonial Era	NKRI Era	Implications
Orientation	Colonial interests	Educational equity and expansion	Paradigm shift
Objective	Administrative purposes	Human resource development	Increased access
Distribution	Unequal	More equitable	Reduced disparities
Access	Limited	Open and widespread	Increased participation
Structure	Dualistic	National and integrated	Reduced discrimination
Role of the State	Limited	Dominant	Improved equity
Equity	Low	Improved	Not yet optimal

Berdasarkan table 2, terlihat adanya perbedaan mendasar antara sistem pembiayaan pendidikan pada era kolonial dan era NKRI dalam berbagai aspek utama. Dari sisi orientasi, sistem pembiayaan

pendidikan pada era kolonial berfokus pada kepentingan politik dan ekonomi pemerintah kolonial, sedangkan pada era NKRI berorientasi pada pemerataan pendidikan. Perbedaan orientasi ini menunjukkan adanya

perubahan paradigma dari pendidikan sebagai alat kekuasaan menjadi pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dalam konteks kebijakan yang lebih luas pada tujuan pembiayaan pendidikan, pada era kolonial bersifat administratif dan terbatas, sementara pada era NKRI diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Dari aspek distribusi dan akses, sistem pembiayaan pendidikan pada era kolonial cenderung tidak merata dan terbatas pada kelompok tertentu, sehingga akses pendidikan menjadi sangat terbatas. Sebaliknya, pada era NKRI, distribusi pembiayaan pendidikan relatif lebih merata melalui berbagai kebijakan nasional, yang berdampak pada terbukanya akses pendidikan bagi masyarakat luas. Hal ini tercermin dari meningkatnya tingkat partisipasi pendidikan secara signifikan. Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan dalam distribusi dan akses, implikasi yang ditunjukkan masih mengindikasikan adanya ketimpangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Perbedaan juga terlihat pada struktur sistem pendidikan dan peran

negara. Pada era kolonial, struktur pendidikan bersifat dualistik yang membedakan akses berdasarkan status sosial dan ras, sedangkan pada era NKRI sistem pendidikan bersifat nasional dan lebih inklusif. Peran negara juga mengalami perubahan signifikan, dari yang sebelumnya terbatas menjadi dominan dalam penyediaan dan pembiayaan pendidikan. Meskipun demikian, dari aspek keadilan, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kondisi pada era NKRI lebih baik dibandingkan era kolonial, keadilan akses pendidikan belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, table 2 menegaskan bahwa transformasi sistem pembiayaan pendidikan telah meningkatkan akses pendidikan, namun masih menyisakan tantangan dalam mewujudkan keadilan akses secara menyeluruh

C. Hasil Penelitian

1. Rendahnya Akses Pendidikan pada Era Kolonial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akses pendidikan pada era kolonial berada pada kondisi yang sangat rendah dan terbatas. Data historis menunjukkan bahwa pada tahun 1900, tingkat partisipasi

pendidikan masyarakat pribumi berada di bawah 5%, dan hanya meningkat menjadi sekitar 6–7% pada tahun 1930. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lebih dari 90% penduduk pribumi tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal. Temuan ini diperoleh dari berbagai sumber arsip historis dan diperkuat oleh kajian literatur sejarah pendidikan yang menunjukkan adanya keterbatasan sistemik dalam penyediaan layanan pendidikan bagi masyarakat pribumi.

Rendahnya akses ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh kebijakan pembiayaan pendidikan yang bersifat diskriminatif dan tidak ditujukan untuk pemerataan. Sistem pendidikan pada masa tersebut lebih mengutamakan kepentingan kolonial dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pendidikan merupakan konsekuensi langsung dari sistem pembiayaan yang eksklusif dan tidak berbasis pada prinsip keadilan.

2. Struktur Pembiayaan dan Diskriminatif pada Era Kolonial

Selain rendahnya akses, struktur pembiayaan pendidikan pada era kolonial juga menunjukkan pola yang diskriminatif. Sistem pendidikan dibagi menjadi beberapa jenis sekolah berdasarkan status sosial dan ras, seperti *Europeesche Lagere School* (ELS) untuk warga Eropa, *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) untuk elite pribumi, serta sekolah desa untuk masyarakat umum dengan kualitas dan pembiayaan yang terbatas. Struktur ini menunjukkan bahwa distribusi pembiayaan pendidikan tidak dilakukan secara merata, melainkan berdasarkan stratifikasi sosial yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial.

Temuan ini sejalan dengan berbagai literatur sejarah pendidikan yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan pada era kolonial lebih difokuskan pada lembaga pendidikan yang mendukung kepentingan administratif kolonial. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan antara kelompok sosial yang berbeda. Hal ini memperkuat argumen bahwa sistem pembiayaan pendidikan pada era

kolonial bersifat eksklusif dan berkontribusi terhadap reproduksi ketidakadilan sosial dalam bidang pendidikan.

3. Peningkatan Signifikan Pembiayaan Pendidikan Pada Era NKRI

Berbeda dengan era kolonial, sistem pembiayaan pendidikan pada era NKRI mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2009. Dalam praktiknya, total anggaran pendidikan nasional mencapai sekitar Rp600–700 triliun per tahun pada periode 2023–2024. Data ini diperoleh dari laporan resmi pemerintah dan didukung oleh publikasi lembaga internasional yang menunjukkan peningkatan komitmen negara terhadap sektor pendidikan.

Peningkatan anggaran ini mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan pendidikan, dari yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi lebih inklusif. Selain itu, sistem pembiayaan pendidikan pada era NKRI juga lebih terstruktur dan melibatkan berbagai sumber

pendanaan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak lagi bersifat terbatas, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks dan berorientasi pada pemerataan.

4. Peningkatan Akses Pendidikan pada Era NKRI

Peningkatan pembiayaan pendidikan pada era NKRI berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang sekolah dasar telah mencapai lebih dari 100%, sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama mencapai sekitar 98%, dan pada jenjang sekolah menengah atas berada pada kisaran 80–90%. Selain itu, tingkat melek huruf di Indonesia telah mencapai lebih dari 96%. Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam akses pendidikan dibandingkan dengan era kolonial.

Peningkatan akses ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan kebijakan pembiayaan pendidikan, tetapi juga menunjukkan adanya

perubahan dalam distribusi layanan pendidikan. Temuan ini diperkuat oleh berbagai laporan nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan dalam memperluas akses pendidikan. Namun demikian, peningkatan ini masih perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks pemerataan, mengingat masih adanya perbedaan akses antar wilayah.

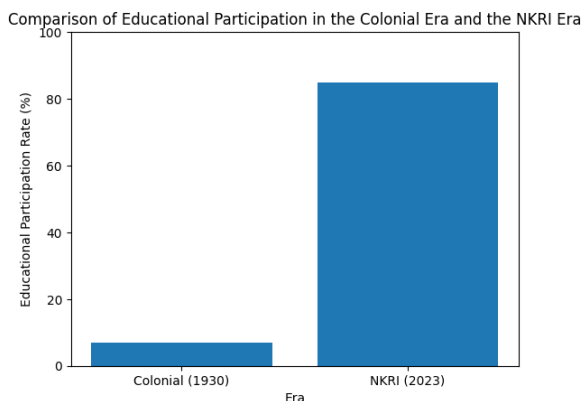


Figure 1. Comparison of Educational Participation Levels in the Colonial Era and the Republic of Indonesia Era

Berdasarkan **Figure 1**, terlihat perbedaan yang sangat signifikan dalam tingkat partisipasi pendidikan antara era kolonial dan era NKRI. Pada era kolonial (sekitar tahun 1930), tingkat partisipasi pendidikan berada pada kisaran yang sangat rendah, yaitu sekitar 6–7%. Sebaliknya, pada era NKRI (tahun 2023), tingkat partisipasi pendidikan

meningkat secara drastis hingga mencapai sekitar 85%. Perbedaan ini menunjukkan adanya lonjakan akses pendidikan yang sangat signifikan dalam kurun waktu historis yang panjang.

Peningkatan yang ditunjukkan pada figure 1 mencerminkan adanya transformasi sistem pembiayaan pendidikan dari yang bersifat eksklusif menjadi lebih inklusif. Pada era kolonial, pembiayaan pendidikan terbatas pada kelompok tertentu, sehingga akses pendidikan tidak merata. Sementara itu, pada era NKRI, kebijakan pembiayaan pendidikan yang didukung oleh alokasi anggaran yang besar serta program nasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, grafik tersebut tidak hanya menunjukkan peningkatan kuantitatif, tetapi juga merepresentasikan perubahan paradigma dalam sistem pendidikan.

5. Peran Program Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Akses

Program pembiayaan pendidikan yang dikembangkan pada era NKRI memiliki kontribusi yang besar dalam

meningkatkan akses pendidikan. Salah satu program utama adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang telah menjangkau lebih dari 45 juta siswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, Program Indonesia Pintar (PIP) juga memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Efektivitas program-program tersebut terlihat dari meningkatnya tingkat partisipasi pendidikan serta menurunnya angka putus sekolah. Temuan ini diperoleh dari data statistik nasional dan diperkuat oleh laporan lembaga internasional yang menunjukkan bahwa intervensi pembiayaan pendidikan memiliki dampak positif terhadap akses pendidikan. Dengan demikian, program pembiayaan pendidikan dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung pemerataan pendidikan.

6. Masih adanya Ketimpangan Akses Pendidikan

Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam

pembiayaan dan akses pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih terjadi. Disparitas terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dan daerah tertinggal (3T). Perbedaan tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dapat mencapai selisih sekitar 10–20% antar wilayah. Data ini diperoleh dari statistik pendidikan nasional dan menunjukkan adanya ketimpangan yang masih signifikan.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa distribusi pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan. Temuan ini sejalan dengan kajian literatur yang menyatakan bahwa peningkatan anggaran tidak selalu diikuti oleh pemerataan akses. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem pembiayaan pendidikan telah mengalami perbaikan, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan akses pendidikan secara optima.

7. Transformasi Sistem Pembiayaan Pendidikan dan Dampaknya

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya

transformasi sistem pembiayaan pendidikan dari yang bersifat eksklusif pada era kolonial menjadi lebih inklusif pada era NKRI. Transformasi ini ditandai dengan peningkatan alokasi anggaran, perluasan program pembiayaan, serta peningkatan akses pendidikan secara signifikan. Temuan ini diperoleh dari berbagai sumber data yang menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam kebijakan dan implementasi pembiayaan pendidikan.

Transformasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketimpangan akses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sistem pembiayaan pendidikan perlu diikuti dengan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis pada prinsip keadilan distributif. Dengan demikian, transformasi yang terjadi belum mencapai tahap optimal dalam mewujudkan keadilan akses pendidikan secara menyeluruh.

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembiayaan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan alokasi pembiayaan pendidikan pada era NKRI tidak secara otomatis

menghasilkan pemerataan akses pendidikan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengembangkan berbagai program pembiayaan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), efektivitas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang saling berkaitan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu prasyarat penting dalam memperluas akses pendidikan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta kondisi sosial-ekonomi dan geografis setiap daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pembiayaan pendidikan adalah **kapasitas fiskal pemerintah daerah**. Dalam sistem desentralisasi, kemampuan setiap daerah dalam menyediakan layanan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskalnya. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi umumnya memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk melengkapi pembiayaan pendidikan

melalui pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, maupun penyediaan layanan pendukung lainnya. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat sehingga kualitas layanan pendidikan cenderung lebih terbatas. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pembiayaan pendidikan menjadi tidak seragam antarwilayah meskipun kebijakan nasional yang diterapkan relatif sama.

Selain kapasitas fiskal, **tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pembiayaan pendidikan. Program BOS telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi hambatan biaya operasional sekolah, namun berbagai evaluasi menunjukkan bahwa efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, transparansi pengelolaan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta kapasitas manajemen sekolah. Sekolah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik cenderung mampu memanfaatkan dana BOS secara lebih optimal dibandingkan sekolah yang masih menghadapi

keterbatasan dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Dengan demikian, peningkatan jumlah anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan apabila tidak diikuti oleh tata kelola yang efektif.

Faktor lain yang sangat menentukan adalah **kondisi geografis Indonesia** sebagai negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam. Perbedaan kondisi geografis menyebabkan biaya penyediaan layanan pendidikan di daerah terpencil jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Distribusi guru, pembangunan infrastruktur sekolah, pengadaan sarana pembelajaran, hingga biaya transportasi menjadi tantangan tersendiri yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan alokasi anggaran secara nasional. Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan pendidikan perlu dipahami dalam konteks karakteristik geografis yang berbeda pada setiap wilayah.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa **daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)** masih menghadapi berbagai

keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara. Meskipun memperoleh dukungan melalui berbagai program afirmasi pemerintah, wilayah 3T masih mengalami keterbatasan infrastruktur pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, rendahnya akses terhadap teknologi pembelajaran, serta tingginya biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan hasil kebijakan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan akses antara wilayah maju dan wilayah tertinggal.

Selain faktor-faktor tersebut, **kualitas implementasi kebijakan** juga menentukan keberhasilan sistem pembiayaan pendidikan. Kebijakan pembiayaan yang dirancang secara baik belum tentu menghasilkan dampak yang optimal apabila implementasinya menghadapi berbagai kendala administratif, koordinasi antarinstansi yang belum efektif, atau lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam

mengimplementasikan kebijakan secara efektif, transparan, dan akuntabel

D. Kesimpulan

Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia mengalami transformasi yang sangat signifikan dari era kolonial ke era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada era kolonial, sistem pembiayaan pendidikan bersifat terbatas, eksklusif, dan diskriminatif, yang berdampak pada rendahnya akses pendidikan masyarakat, khususnya bagi pribumi dengan tingkat partisipasi di bawah 10%. Sebaliknya, pada era NKRI, sistem pembiayaan pendidikan mengalami perubahan menuju arah yang lebih inklusif, ditandai dengan kebijakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN serta berbagai program pembiayaan pendidikan yang mampu meningkatkan akses pendidikan secara signifikan hingga di atas 80%.

Meskipun terjadi peningkatan akses pendidikan yang sangat signifikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan masih terjadi,

terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta daerah maju dan tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi yang berbasis kebutuhan. Dengan demikian, sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan akses pendidikan secara optimal.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat akses pendidikan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana sumber daya tersebut didistribusikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih adaptif, berorientasi pada prinsip keadilan distributif, serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan pembiayaan pendidikan tidak hanya meningkatkan akses secara kuantitatif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan akses pendidikan secara substantif.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif dalam pembiayaan pendidikan, khususnya bagi daerah tertinggal dan kelompok masyarakat rentan. Selain itu, optimalisasi distribusi anggaran berbasis kebutuhan serta peningkatan efektivitas program pembiayaan pendidikan menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, F., Lensa, R., YUSDIANA, E., SAFITRI, A., NUSRINI, I., NOVITA, W., ISNAINI, F., JUFNI, M., YUSUF, M., & SARTIKA, D. (2024). *Historiografi Undang-Undang Pendidikan Di Indonesia: Sejak Zaman Kolonial Hingga Zaman Reformasi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Harahap, N. I. Y. (2024). Problematika Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 133–149.
- DOI:
<https://doi.org/10.37348/aksi.v2i2.373>
- Huang, F. (2018). Higher education financing in Japan: Trends and challenges. *International Journal of Educational Development*, 58, 106–115.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.12.010>

- Ifyati, N., Yuliati, S., Ghofur, A., Apriliantin, H., Wahyuningsih, N., Sukwanita, D., Al-Chusairi, A., Qomariyah, T. N., Rukayah, S., & Al Fuadah, Z. (n.d.). *Fondasi dan Arah Pendidikan Indonesia*.
- Kambu, Y. (2025). *SOSIOLOGI PENDIDIKAN*. Tren Digital Publishing.
- Kwartawaty, N. N., Dian, S., Prajanti, W., Pramomo, S. E., & Khafid, M. (n.d.). *Quality Education for the future : Challenges and Opportunities Towards 2030*. Retrieved <http://proceeding.unnes.ac.id/ISE T>
- Lesmana, G. (2025). *Sekolah Rakyat*. umsu press.
- Madyan, M., Nada, N., Fitri, F., Mery, M., & Fahria, F. (2025). Perbandingan Historis Sistem Pendidikan Kolonial Belanda dan Pendidikan Indonesia Masa Kini. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(4), 856–862.
- Manguwinata, S. M. I., Kurniady, D. A., Tjutju Yuniarsih, S. E., & Abubakar, M. P. (2025). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Strategi Dan Model Dalam Meningkatkan Mutu*. Indonesia Emas Group.
- Maulidina, R. A., Hanifah, N. L., Amalia, T., & Kuncara, A. B. (2025). Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 228–232.
- Mustabsyirah, M., & Yuspiani, Y. (2025). Analisis Kebijakan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional dan Dampaknya terhadap Pendidikan Madrasah. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(3), 1692–1704.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, 3(2).
- Nover, F., Us, K. A., & Shalahudin, S. (2025). Konsep Dan Praktik Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 56–64.
- Prihatin, E., Kadarsah, D., & IZFS, R. D. (2025). *Kebijakan Pendidikan Nasional: Transformasi Digital untuk Sistem yang Inklusif*. Indonesia Emas Group.
- Prihatin, E., & Sutangsa, S. P. (2025). *Transformasi Kebijakan Pendidikan: dari Konsep hingga Pelaksanaan di Era Digital*. Indonesia Emas Group.
- Rahayu, T. S. (2025). *Paradigma baru dalam era desentralisasi pendidikan (Menuju Indonesia Emas 2045)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rohayati, S., Rohmi, S., & Subhani, A. (2025). *Perkembangan Pendidikan Dasar di Indonesia*

Sejak Kemerdekaan Hingga Kini.
*Eduversity: Journal of Future
Interdisciplinary Education*, 1(1),
8–14.

Runiasih, M., & Ahmad, M. (2025).
Ketimpangan pembiayaan
pendidikan antar daerah di
Indonesia: kajian literatur
terhadap desentralisasi fiskal dan
pemerataan akses. *Jurnal
Manajemen Pendidikan*, 10(2),
839–843.

Sari, D. A., Ilianti, R. F. P., Narfais, A.
D. M., Yogasara, W., Adywibowo,
I. P., Tiningsih, E., Nursalim, M., &
Yulianingsih, W. (2026). *Analisis
Kebijakan Pendidikan
Kontemporer: Pendekatan Kritis,
Desentralisasi, dan Inovasi
Kebijakan*. CV. Penerbit Ilmu
Literasi dan Riset (Pilar).

Simanjuntak, A., Siahaan, A., &
Abdurrahman, M. P. (2026).
*MANAJEMEN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN: Konsep,
Kebijakan, dan Implementasi di
Sekolah Menengah*. Penerbit K-
Media.

Van Niel, R. (2023). *The emergence of
the modern Indonesian elite*. Brill.